

“Merdeka Belajar – Kampus Merdeka”

Dalam Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan

Fachrissal

*Pendidikan Seni Budaya Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
risalfach@gmail.com*

Abstrak

“Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di era Kabinet Indonesia Maju. Menteri Kemendikbud RI berpendapat bahwa esensi merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir sehingga harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem Makarim menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Demikian pula esensi “Kampus Merdeka” – yang diharapkan mampu menjadi jawaban atas tuntutan zaman - merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tujuan kajian artikel ini adalah mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan dalam membangun pendidikan berkebudayaan yang dikorelasikan terhadap esensi kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka”. Bukan tidak mungkin bila konsep “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” sesungguhnya sudah ada dalam pemikiran bapak pendidikan bangsa ini sehingga hanya perlu menyesuaikan terhadap pola di zaman sekarang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif terhadap penafsiran fenomena sosial dalam bentuk literatur. Kebenaran yang dicari bersifat alamiah sehingga bukan bagaimana seharusnya tetapi bagaimana adanya dari hasil kajian literatur. Hasil kajian ini tentu saja diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan pendidikan secara luas dan di dalam konteks pendidikan seni.

Kata kunci : merdeka belajar; ki hajar; ahmad dahlan

1. Pendahuluan

“Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di era Kabinet Indonesia Maju. Menteri Kemendikbud RI berpendapat bahwa esensi “Merdeka Belajar” adalah kemerdekaan berpikir sehingga harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem Makarim menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Demikian pula esensi “Kampus Merdeka” - yang diharapkan mampu menjadi jawaban atas tuntutan zaman - merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Sebagai pijakan dan memperkuat program “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” maka diterbitkan payung hukum untuk mendasari proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim telah mengeluarkan payung hukum berupa Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. Dan untuk tingkat perguruan tinggi ada lima permendikbud sebagai payung hukum, yaitu : 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; 3) Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4) Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan

Tinggi Negeri; dan 5) Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan memilih konsep "Merdeka Belajar" sebagai program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena kata "Merdeka Belajar" paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Dalam "Merdeka Belajar" terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran (Kompas.com : 2020). "Merdeka Belajar" yang dibutuhkan di era saat ini adalah bagaimana peserta didik tidak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia, namun bisa menggunakan metode belajar yang paling cocok digunakan. Cocok dengan kata merdeka, dengan pemikiran merdekanya anak-anak kita, agar tidak terjajah oleh sosial media maupun orang lain. Kemerdekaan itu juga sesuai untuk guru di dalam kelas, agar dapat menentukan sendiri apa cara mengajar yang terbaik untuk anak didiknya. Selain itu, guru juga dapat secara merdeka untuk memilih elemen-elemen dari kurikulum yang terbaik. Kemerdekaan ini berlaku juga untuk kepala sekolah agar mandiri dalam menentukan apa yang terbaik menggunakan anggaran. Kemerdekaan dari mahasiswa untuk menentukan pendidikan yang terpenting - bukan hanya di kampus tetapi juga di dunia industri - dalam mengerjakan proyek wirausaha, dalam mengajar di desa, dan membangun proyek di desa penelitian.

Pada dasarnya esensi konsep "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka" dalam konteks implementasi menawarkan pilihan kepada siswa atau mahasiswa untuk menentukan sendiri cara belajar, baik dari konten yang dipelajari, strategi belajar yang sesuai, dan *assessment* yang digunakan. Artinya siswa dan mahasiswa mendapatkan pilihan belajar berdasarkan kebutuhan dan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh mereka ke depan. Misalkan pilihan pada konten-konten tertentu ingin belajar di kampus atau di luar kampus, atau dengan konten yang sama namun belajar pada program studi yang berbeda sehingga

tercipta multi disiplin, dan kemudian tersedia pula pilihan pada *assessment* untuk menentukan ketercapaian kompetensi peserta belajar. Memberi pilihan cara belajar pada peserta belajar ini atas dasar bahwa semua anak unik sehingga setiap anak berpotensi sukses, setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, dan setiap anak berbeda kecepatan belajarnya. Kemudian anak sebagai subyek pendidikan sehingga guru menjadi objek, karena guru sebagai obyek harus memberikan ruang pilihan dan menjadi fasilitator dalam belajar anak bukan sebagai edukator. Sehingga konsekuensi "Merdeka Belajar" menuntut adanya penyajian topik yang beragam dan peserta belajar boleh memilih salah satu topik yang sesuai sekaligus memberikan pilihan waktu belajar, cara belajar, serta model penilaian (Martadi : 2020).

Melihat dalam konteks itu semua - terlepas dari harapan dan tantangan dari program "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka" tersebut - ada hal yang perlu dicermati sesungguhnya bahwa tokoh pendiri pendidikan bangsa ini telah lama menawarkan konsep kemerdekaan dalam belajar. Sehingga hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk dicermati lebih dalam - sejauh mana korelasi konsep kemerdekaan dalam belajar tersebut yang ditawarkan Nadiem Makarim yang bersifat kekinian terhadap konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif terhadap penafsiran fenomena sosial dalam bentuk literatur. Kebenaran yang dicari bersifat alamiah sehingga bukan bagaimana seharusnya tetapi bagaimana adanya dari hasil kajian literatur. Oleh sebab itu jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dari beberapa buku dan jurnal yang kemudian pemikiran mereka di elaborasi menjadi hipotesis baru. Sesungguhnya banyak sekali bapak pendidik bangsa di negeri ini, namun penulis membatasi pada subyek penelitiannya pada konsep dan pandangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan. Penulis ingin meneliti dan mendeskripsikan bagaimana konsep dasar dan pandangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka sehingga ditemukan gambaran konsep dan pandangannya.

Tujuan dari hasil kajian ini tentu saja diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan pendidikan secara luas. Dan di

dalam konteks pendidikan seni khususnya untuk menjadi pertimbangan serius dalam memformulasikan sistem dunia pendidikan kita yang tidak bisa lepas dari kesejarahan humanismenya.

3. Pembahasan Hasil

Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan merupakan dua tokoh bapak pendidikan bangsa Indonesia yang sangat harum namanya hingga sekarang. Pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut masih sering diadopsi dan elaborasi dalam praktek-praktek di dunia pendidikan negeri ini. Dua karakter dan latar belakang yang berbeda menjadikan beliau sangat dalam dan khas dalam meimplementasikan konsep pendidikan yang cocok pada karakteristik bangsa Indonesia.

3.1. Ki Hadjar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dan diberi nama R.M. Suwardi Surjaningrat (Suryaningrat). Ia adalah putra dari K.P.H. Surjaningrat. Pada tanggal 23 Februari 1928, setelah 40 tahun, R.M. Suwardi Suryaningrat mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara (Soejono, 1960:153). Masa kecilnya ia melakukan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan bangsawan pada waktu itu, pada masa kecilnya ia justru banyak bergaul dengan anak-anak dari rakyat jelata.

Ki Hadjar Dewantara menyelesaikan pendidikan dari sekolah rendah Belanda (E.L.S. – *Europeesche Lagere School*), kemudian melanjutkan pendidikannya ke STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) yaitu sebuah sekolah dokter yang berbahasa Indonesia di Jakarta, kendatipun disana Ki Hadjar Dewantara tidak dapat menyelesaikan sekolah dokternya.

Setelah empat tahun berada di Belanda dan kemudian pulang ke Indonesia, Ki Hadjar Dewantara memilih pendidikan sebagai tempat pengabdian. Saat itu beliau melihat bahwa pendidikan sebagai lapangan perjuangan yang dilupakan, sehingga ia mengambil lapangan pendidikan rakyat sebagai lapangan perjuangan. Melalui perjuangan dalam pendidikan itu Ki Hadjar Dewantara dapat memberikan jiwa merdeka pada anak-anak dan itu berarti ia mempersenjatai bangsa yang dijajah untuk

berjuang menuntut kemerdekaannya. (Tauchid, 1967:4-5). Oleh sebab itu tahun 1922 – tepatnya 3 Juli 1922 – Ki Hadjar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan Siswa berarti murid. Yang pada mulanya sekolah Taman Siswa ini diberi nama "*National Onderwijs Institut Taman Siswa*", yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama-sama dengan teman di paguyuban *Sloso Kliwon*.

Ki Hadjar Dewantara membedakan antara pendidikan (*opvoeding*) dengan pengajaran (*onderwijs*). Pengajaran adalah pendidikan dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan yang mempengaruhi kecerdasan pada anak-anak, yang bermanfaat untuk hidup lahir batin anak-anak (Tauchid dkk., 1962:20). Sementara pendidikan adalah upaya kebudayaan yang berazaskan keadaban untuk memberikan dan memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektualitas) dan tubuh anak yang selaras dengan dunianya. Oleh sebab itu segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan yang tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat (Dewantara, 1962:14-15; Tauchid dkk., 1962:20, 166).

Dengan demikian pendidikan merupakan sebuah tuntunan, dimana pertumbuhan hidup anak bukan ditentukan oleh kehendak pendidik. namun menuntun pertumbuhan dan hidup anak agar dapat bertambah baik budi pekertinya (Tauchid dkk., 1962:21). Ki Hadjar Dewantara (1957:42-43) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Atas dasar itulah kemudian konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengajarkan tiga hal, yaitu ; 1) sistem *among*; 2) tripusat pendidikan; dan 3) tringgo (ngerti, ngroso, nglakoni) (Tauchid, 2004)

Sistem Among

Sistem *among* ini meletakkan pendidikan sebagai alat dan syarat untuk anak-anak hidup sendiri dan berguna bagi masyarakat. Pengajaran bagi Taman Siswa berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Guru tidak hanya memberi pengetahuan yang baik dan perlu saja, akan tetapi harus juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya

guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Tiap-tiap guru, dalam pola pikir Ki Hadjar Dewantara adalah abdi sang anak, abdi murid, bukan penguasa atas jiwa anak-anak (Sudarto, 2008).

Tripusat Pendidikan

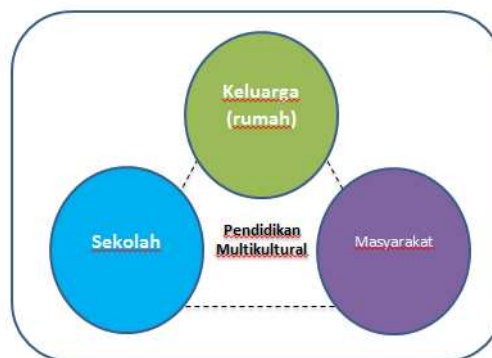
Ki Hadjar Dewantara mengajarkan sistem Tri Pusat Pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan masyarakat. Konsep Tri Pusat ini tidak bisa diabaikan. Sistem pendidikan nasional kita tidak ditempatkan di dunia lingkungan sekolah saja, akan tetapi perlu ada keikut-sertaan keluarga dan masyarakat yang membentuk sukses dan gagalnya pendidikan nasional. Pendidikan di alam demokrasi tidak hanya diserahkan pada guru di lingkungan civitas akademik saja. Sebab pendidikan yang benar bukan mengasah intelektual semata namun juga rohani kejiwaan anak didik dan fisik kesehatan jasmani.

Sesungguhnya pendidikan keluarga adalah wadah yang luhur dan istimewa, karena keluarga merupakan lingkungan yang kecil, tetapi keluarga merupakan tempat yang suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya. Oleh sebab itu keluarga merupakan satu pusat pendidikan yang mulia. Seseorang dapat menerima segala tradisi mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya dalam lingkungan keluarga, (Ki Hadjar Dewantara (1957:36). Kemudian Tauchid (1962:71-72) juga menjelaskan bahwa pentingnya menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan karena keluarga tidak hanya menjadi ajang untuk melaksanakan pendidikan individual dan sosial tetapi menjadi kesempatan bagi orang tua untuk menanamkan segala benih nurani dalam jiwa anak-anak. Apabila keluarga menjadi pusat pendidikan maka secara tidak langsung orang tua berperan sebagai guru yang mendidik perilakunya dan sebagai pengajar yang memberikan kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan, serta menjadi teladan dalam kehidupan sosial.

Oleh sebab itu bila sistem sekolah masih bertujuan untuk pencarian dan pemberian ilmu pengetahuan dan kecerdasan pikiran maka pengaruhnya

tidak akan terlalu banyak. Pendidikan dalam alam perguruan berkewajiban untuk mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian ilmu pengetahuan. Apabila sekolah dan keluarga berpisah maka pendidikan yang dihasilkan dalam ruang keluarga akan selalu sia-sia, sebab pengaruh sekolah yang mengasah intelektual yang sangat kuat. Ki Hadjar Dewantara mencontohkan pada waktu itu, anak-anak harus mengasah inteletknya setiap hari kurang lebih selama delapan jam. (Tauchid, 1962:72-73). Dengan demikian sekolah tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan keluarga. Sekolah dan keluarga dapat saling mengisi dan melengkapi agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

Konsep Pendidikan Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara sekaligus juga pengajaran kepada kita tentang pembelajaran model multikultural yang meliputi proses pendidikan di keluarga (rumah), di sekolah dan di masyarakat yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Garis - - - bermakna sebagai tali ikatan bersifat integral dan komplemente saling mendukung satu sama lainnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat ditarik konklusi sebagai berikut: Pertama, melalui pembelajaran multikultural keunikan manusia dengan perbedaan agama, keyakinan, ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang dapat dihargai secara sepadan. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Kedua, konsep pendidikan multikultural Tri Pusat Pendidikan merupakan salah satu terobosan yang diharapkan dapat mewujudkan percepatan pemahaman dan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.

Melalui tiga matra pendidikan, 1) Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal, kedua orang tua dan anggota keluarga dapat mendidik anak-anak mereka untuk memahami pentingnya kesamaan hak semua orang, yang berbeda suku, ras, agama, keyakinan, budaya, warna kulit, strata sosial dan nilai-nilai kemanusiaan; 2) sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dapat menanamkan pendidikan nilai-nilai multikultural yang bersifat sistematis, akademik dan terkontrol; 3) masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal, mampu menumbuhkan kesadaran melalui kehidupan nyata, terkait dengan pentingnya memandang keragaman manusia tanpa membedakan agama, kepercayaan, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmaniah dan status sosial (Mukodi : 2012).

3.2. K.H. Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di kampung Kauman, Yogyakarta. Waktu itu Yogyakarta di bawah naungan Sri Sultan Hamengku Buwono VII. K.H. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, putra dari K.H. Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti Aminah binti almarhum K.H. Ibrahim. Ayahnya seorang khatib tetap Masjid Agung Yogyakarta. Sedangkan ibu beliau adalah putri dari Penghulu Besar di Yogyakarta. Sebelum beliau mendapat gelar dan nama K.H. Ahmad Dahlan, nama yang diberikan orangtuanya adalah Muhammad Darwis. Nama K.H. Ahmad Dahlan diperoleh dari para Kiai setelah beliau selesai menunaikan ibadah haji. Beberapa literatur menyebutkan bahwa K.H. Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribig (salah satu ulama pada zaman Mataram) dan Maulana Ibrahim (Sunan Gresik).

Latar belakang pendidikan K.H. Ahmad Dahlan memang sangat lekat dengan dunia keislaman yaitu pendidikan pesantren. Beliau pernah menjadi santri dari Kiai Sholeh Darat selama dua tahun bersama dengan K. H. Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama (NU) – kendatipun sebelumnya mereka sudah saling mengenal ketika sama-sama belajar di pesantren Madura asuhan Kiai Kholil Bangkalan. Hingga pada suatu ketika, Sri Sultan Hamengku Buwono VII

mengutus Raden Ngabei Ngabdul Darwis (panggilan Kraton terhadap Ahmad Dahlan) untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Di sana beliau berjumpa kembali dengan kawan lama Hasyim Asy'ari dan kemudian mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib.

K.H. Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1909 K.H. Ahmad Dahlan kembali ke tanah air dan bergabung di Organisasi Boedi Oetomo. Sebuah organisasi yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasionalis sehingga menjadi wadah beliau menyalurkan ilmu yang dikuasai untuk memenuhi keperluan para anggota. Tiga tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November 1912/8 Dzulhijjah 1330, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Beberapa literatur menggambarkan sosok K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah tipe *man of action* sehingga lebih banyak mewariskan amal usaha bukannya tulisan. Oleh sebab itu untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofis pendidikan beliau mesti lebih banyak merujuk pada bagaimana beliau membangun sistem pendidikan. Dalam naskah pidato terakhir beliau yang berjudul "Tali Pengikat Hidup" menarik untuk dicermati karena menunjukkan secara eksplisit konsentrasi K.H. Ahmad Dahlan terhadap pencerahan akal suci melalui filsafat dan logika. Sedikitnya ada tiga kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat Beliau dalam pencerahan akal, yaitu: (1) pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci; (2) akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia; (3) ilmu mantiq atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah SWT (Fadli & Andi : 2018).

Dalam bahasa yang lebih lugas Amir Hamsyah Wirjosukarto menyimpulkan bahwa tujuan umum pendidikan K.H. Ahmad Dahlan adalah : a) Baik budi, alim dalam agama; b) Luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia (umum); c) Bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Sehingga kemudian dalam konteks tersebut muncul

pemikiran pembaharuan pendidikan dan pengajaran islam dalam empat pokok model pembaharuan, yaitu : a) Sistem belajar mengajar *Weton* dan *Sorogan* diganti dengan sistem klasikal cara barat; b) Bahan pelajaran semata-mata agama, kitab-kitab karangan ulama pembaharuan tidak dipergunakan. Sehingga di perbaharui menjadi bahan pelajaran tetap, ditambah ilmu pengetahuan umum. Kemudian kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik klasik maupun kontemporer; c) Belum ada Rencana Pembelajaran yang teratur dan integral sehingga K.H. Ahmad Dahlan membuat Rencana Pembelajaran yang teratur; d) Hubungan guru dan murid yang lebih bersifat otoriter dan kurang demokratis diganti dengan cara suasana hubungan guru dan murid lebih akrab, bebas dan demokratis (Ismail : 2014).

Dengan demikian, sistem pendidikan yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan merupakan suatu model pembaruan yang merupakan integrasi antara sistem dan unsur lama dengan yang baru. Hal ini dimaksudkan bahwa, unsur lama tetap dipertahankan seperti agama Islam sebagai asas, sedangkan unsur-unsur baru seperti model dan strategi pembelajaran diadopsi dari sistem Barat. Dalam pengertian lain, pembaruan pendidikan yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah untuk mewujudkan sebuah peradaban universal yang lahir dari ketegangan zikir dan pikir. Peradaban seperti inilah yang ingin ditawarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan, sebagai alternatif bagi masa depan umat Islam Indonesia.

4. Kesimpulan

Secara kondisional sesungguhnya konsep dari "kemerdekaan" dalam belajar berangkat pada situasi yang berbeda. "Kemerdekaan" dalam belajar yang diperjuangkan Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan notabene lahir pada situasi kolonialisme, sementara konsep "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka" Nadiem Makarim muncul di zaman milenium dan siberetik. Sehingga dalam konteks tersebut memiliki tantangan dan implementasi yang berbeda.

Namun pada prinsipnya secara fundamental konsep-konsep tersebut

memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin terlepas dalam "keterjajahan" intelektualitas. Ketiganya (Ki Hadjar Dewantara, K.H. Ahmad Dahlan, dan Nadiem Makarim) lebih mengedepankan pola humanistik dalam proses pembelajaran. Dimana pola humanistik terasa lebih cocok pada karakter bangsa Indonesia yang menginginkan pendidikan berkebudayaan.

Dalam konteks berkebudayaan itulah Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan selalu meletakkan pendidikan sebagai sebuah proses pengalaman-pengalaman terhadap ilmu dan pengetahuan dan lebih "memerdekakan" peserta didik dalam mengeksplorasi pembelajaran tersebut berdasarkan kadar potensi anak masing-masing - sehingga peserta didik menjadi lebih plastis bukan menjadi pabrik dengan *output* produk tertentu sebagai jawaban tantangan dunia. Dalam pandangan Yudi latif bahwa pendidikan itu bukan pabrik batu-bata tetapi proses penempaan tanah liat, bukan manusia teknis siap pakai melainkan manusia beradaptasi tinggi.

Seiring dengan itu tampaknya konsep "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka" dipandang lebih industrialis sehingga cenderung praktis dan instan bahkan miskonsepsi dalam menjawab tantangan zaman. - dimana kemudian hal ini menjadi sinisme di dalam memahami MBKM.



Gambar 2. Ilustrasi konsep pendidikan

Sesungguhnya berangkat dari beberapa hal kesamaan terhadap konsep dan pemikiran dalam konteks pendidikan dapat menegaskan kembali arah pendidikan nasional dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang terpenting dalam pemahaman pembangunan manusia adalah peningkatan kualitas hidup yang tentu saja pokok orientasinya adalah pengembangan kapabilitas seseorang. Dengan perpektif manusia dipandang sebagai makhluk dengan segala ciri potensi maka beban pendidikan adalah memfasilitasi dorongan individu untuk

mengaktualisasikan potensi masing-masing individu. Sehingga pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai menciptakan produk manusia industri namun manusia yang berbudaya (Latif : 2020).

5. Pustaka

- Darmawan, I Putu Ayub. (Mei 2016), *Pandangan dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, diambil dari <https://www.researchgate.net/publication/320322205>
- Fadli, Muhammad & Djollong, Andi Fitriani. (Maret 2018), "Konsep Pendidikan Menurut KH. Ahmad Dahlan", dalam *ISTIQRO Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Volume V Nomor 2, Magister UM ISSN 2548-7906, 2338-9974, Parepare.
- Ismail. (Juni 2014), "Konsep Pendidikan KH. Ahmad Dahlan", dalam *AL-QALAM Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, Volume 6 No. 1, LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah, Sinjai.
- Kamil, Irfan. (27 Agustus 2020), *Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem soal Konsep Merdeka Belajar*. Kompas.com. Diakses pada 28 November 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/827/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar>.
- Martadi. (November 2020), *Perkuliahan Kurikulum Pendidikan Seni*, Pascasarjana Unesa, Surabaya.
- Mukodi. (Juni 2012), "Konsep Pendidikan Berbasis Multikultural Ala Ki Hadjar Dewantara", dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 4 Nomor 1, STKIP PGRI Press, Pacitan.
- Mu'thi, M.Ed, Dr. Abdul. Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, Prof. Dr. Djoko Marihandono, Tim Museum Kebangkitan Nasional. (2015), *K.H. Ahmad Dahlan (1868 – 1923)*, Museum Kebangkitan Nasional Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Jakarta.
- Latif, Yudi. (2020), *Pendidikan yang Berkebudayaan : Historis, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, Gramedia, Jakarta.
- Sudarto, Ki Tyasno. (2008), *Pendidikan Modern dan Relevansi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara*, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.
- Soejono, Ag. (1960), *Aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Harapan Masa, Djakarta.
- Tauchid, Moch. (1967), "Tugas Taman Siswa", dalam *Pembangunan Masyarakat Baru*, Pusara 67, Djilid XXVIII, No. 7-8.
- Tauchid, Moch., Soeratman, Sajoga, Ratih S. Lahade, Soendoro, Abdurrachman Surjoamihardjo. (1962), *Karya K.H. Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta.
- Wiryopranoto, Suhartono. Prof. Dr. Nina Herlina, M. S, Prof. Dr. Djoko Marihandono, Dr. Yuda B Tangkilisan & Tim Museum Kebangkitan Nasional. (2017), *Ki Hadjar Dewantara "Pemikiran dan Perjuangannya"*, Museum Kebangkitan Nasional Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Jakarta.